

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta berdiri sejak 16 Juni 1946, yang bersamaan dengan pembentukan Pemerintah Kota Surakarta. Dasar hukum pembentukan DPRD Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. DPRD dipimpin oleh lima pimpinan yang terdiri dari satu Ketua dan empat Wakil Ketua. Struktur pimpinan tersebut mencerminkan berbagai partai politik yang terdapat di DPRD Kota Surakarta. Saat ini, dipimpin oleh Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P dari Partai PDI. DPRD Kota Surakarta berlokasi di Jl. Adi Sucipto No. 143A Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta merupakan lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat kota serta sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD akan memberikan suara dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, dan juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. DPRD Kota Surakarta mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat.

Fungsi utama DPRD Kota Surakarta yang dikenal dengan istilah “*Trifungsi*”, yaitu proses legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Kota Surakarta menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (raperda), lalu membahas serta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan pemerintah Kota, serta mengawasi pelaksanaan daerah dan kebijakan pemerintah Kota untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (DPRD Kota Surakarta, 2024).

Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPRD Kota Surakarta mempunyai hubungan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui Setwan (Sekretariat Dewan) Surakarta. Setelah berbagai produk hukum tersebut disahkan oleh DPRD, tim pengelola Setwan Surakarta akan melakukan tugasnya untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui JDIH (Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2023).

JDIH DPRD Kota Surakarta merupakan sistem yang menyediakan, mendokumentasikan, serta menyebarkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Surakarta secara transparan dan terbuka. Sistem ini dikelola oleh Sekretariat Dewan dibawah pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang relevan dengan kebijakan oleh Pemerintah Kota.

JDIH DPRD Surakarta dapat diakses secara *offline* maupun *online*. Adapun produk hukum yang tersedia yaitu peraturan hukum, monografi hukum, artikel hukum, yurisprudensi dan infografis/videografis. Selain itu, JDIH juga mempunyai inovasi seperti Arsip digital dprd, E-notulen, dan E-tamu (JDIH Setwan Surakarta, 2025).

Dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat, JDIH DPRD Kota Surakarta memanfaatkan berbagai jenis media. Penggunaan media dalam penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis, yaitu media cetak seperti koran dan majalah, ataupun media elektronik seperti radio dan televisi, hingga media baru yaitu internet. Dalam hal ini, JDIH DPRD Kota Surakarta memanfaatkan media baru yang dikemas dalam bentuk video, yaitu Platform Youtube.

Platform Youtube berada ditingkat kedua dunia setelah google.com yang jumlah kunjungannya sebanyak 101,3 miliar, sedangkan jumlah

kunjungan Youtube yaitu sebanyak 47,12 miliar per Juli 2025. Lalu, Facebook berada ditingkat ketiga dengan jumlah kunjungan yaitu 9,94 miliar kunjungan, dan Instagram berada ditingkat empat dengan jumlah kunjungan sebanyak 5,70 miliar.

Pada tingkat keterlibatan pengguna, jumlah rata-rata halaman per kunjungan Youtube berada ditingkat pertama yaitu 8,69 halaman per kunjungan, dan Youtube memiliki rata-rata rasio pentalan terendah yaitu 31,55%. Hal ini menunjukkan bahwa, pengunjung di Youtube tidak langsung keluar dari Platform, namun tetap melanjutkan aktivitasnya seperti menonton lebih banyak video, mengeksplor rekomendasi, atau berinteraksi. Sehingga, Youtube tidak hanya populer, tetapi juga efektif untuk menjaga *engagement* pengguna (Global Media Insight, 2022).

Terdapat sekitar 143 juta pengguna aktif per Februari 2025 yang menggunakan Platform Youtube, sehingga Youtube menjadi Platform video *online* terpopuler di Indonesia. Jangkauan yang didapat pada iklan Youtube di Indonesia mencapai 50,2% dari populasi 67,3% total pengguna internet. Hal ini menunjukkan bahwa, dominasi Platform Youtube menjadi sumber hiburan dan juga penyebaran informasi berbentuk video. Rata-rata waktu masyarakat Indonesia dalam mengakses Platform Youtube adalah 1.744 menit per bulan atau sekitar 29 jam 4 menit. Sehingga, Indonesia menempatkan sebagai negara dengan durasi pemakaian Youtube terbanyak kesepuluh di dunia (Kemp, 2025).

Youtube memiliki kapasitas distribusi lintas kanal yang luas. Video yang diunggah pada Youtube dapat ditayangkan di berbagai platform lain seperti website, blog, email, dan media sosial lainnya. Dalam hal ini yaitu video *company profile*, yang dapat dibagikan di kanal media sosial lain hingga

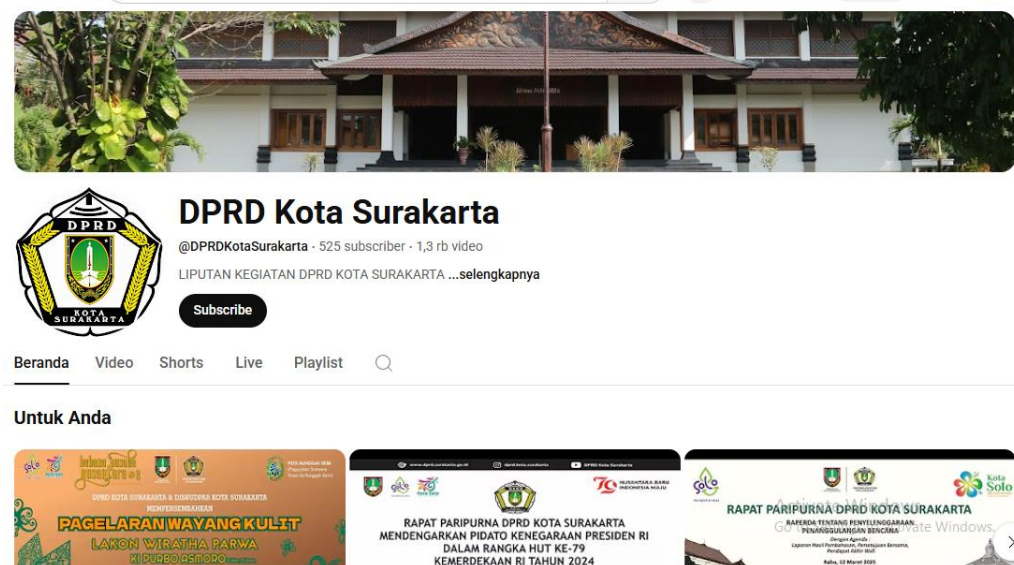
muncul pada hasil pencarian Google sehingga dapat meningkatkan jangkauan dan otoritas digital.

JDIH DPRD Kota Surakarta memanfaatkan Platform Youtube sebagai penyebaran informasi. Akan tetapi akun Youtube tersebut menjadi satu dengan DPRD Kota Surakarta yang mempunyai *username @DPRDKotaSurakarta*, sehingga *activity output* JDIH berada di akun Youtube tersebut pada bagian *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta.

Pengelola media sosial JDIH DPRD Kota Surakarta, Setya Rini lewat wawancara secara tidak langsung mengatakan bahwa :

“Memang untuk akun Youtube JDIH DPRD Kota Surakarta itu tidak ada, karena dari awal pembuatan sudah difokuskan untuk Youtube DPRD Kota Surakarta saja, untuk kegiatan dari JDIH akan diupload pada *Playlist* yang sudah tersedia.” (13/4)

Akun Youtube dengan *username @DPRDKotaSurakarta* yang aktif sejak 12 Februari 2014, saat ini memiliki 524 *subscriber*, dengan jumlah 1,343 video dan 69.646 kali penayangan, terhitung dari postingan pertama yaitu pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan postingan terakhir pada tanggal 30 Maret 2025. Akun ini berisikan seputar liputan dari kegiatan DPRD Kota Surakarta. Data disajikan sebagai berikut :



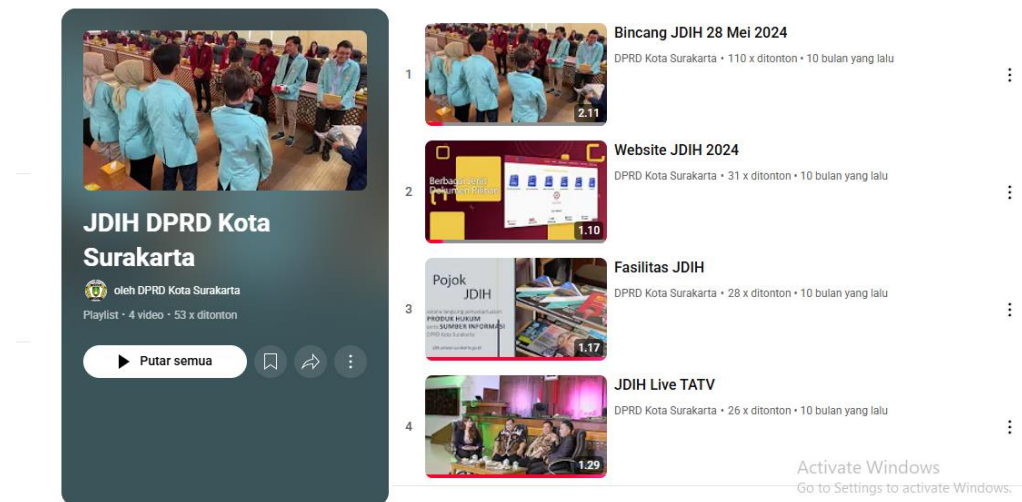
Gambar 1. 1 Akun Youtube DPRD Kota Surakarta

(Diakses pada 25/04/2025 dari Platform media sosial Youtube)

Akun Youtube ini aktif dalam publikasi konten terkait kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta. Platform ini berfungsi sebagai saluran publikasi digital dalam menyebarkan informasi tentang legislasi, berbagai produk hukum, serta proses pembuatan kebijakan daerah. Pada saat kegiatan rapat secara terbuka dan umum akan dilakukan *live streaming*. Untuk konten berdurasi pendek akan diunggah pada bagian *shorts*, dan untuk konten informasi JDIH akan diunggah pada bagian *Playlist* yang sudah dibuat sejak tahun 2024.

Adapun nama *Playlist* yang dibuat oleh *username* @DPRDKotaSurakarta yaitu JDIH DPRD Kota Surakarta, tujuannya untuk menavigasi serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum, sesuai kebutuhan tanpa harus mencari satu per satu video yang diunggah pada kanal Youtube DPRD Kota Surakarta.

Playlist JDIH DPRD Kota Surakarta baru mempunyai 4 video dan total 53 penayangan, terhitung dari postingan pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan postingan terakhir pada tanggal 3 Juni 2024. *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta ini nanti akan fokus pada kegiatan yang dilakukan oleh JDIH tersebut. Data disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. 2*Playlist*Youtube JDIH DPRD Kota Surakarta

(Diakses pada 25/04/2025 dari Platform media sosial Youtube)

Saat ini, *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta baru mempunyai empat video yang terdiri dari JDIH Live TATV (Cuplikan video pimpinan DPRD bersama dengan *Host* dari TATV), Fasilitas JDIH (Menampilkan berbagai *footage* fasilitas yang dimiliki JDIH DPRD Kota Surakarta), Website JDIH 2024 (*Slideshow* yang menjelaskan isi website dari JDIH DPRD Kota Surakarta), dan Bincang JDIH 28 Mei 2024 (Pertemuan para mahasiswa dari UNISRI dan UMS untuk membahas JDIH dengan Pimpinan Setwan Kota Surakarta).

Dengan adanya *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta yang dibuat di akun Youtube DPRD Kota Surakarta, diharapkan dapat membantu menavigasi

masyarakat dalam mencari informasi hukum yang dibuat oleh DPRD Kota Surakarta, dan dapat meningkatkan *Engagement Rate* pada kanal Youtube tersebut. Terlebih pada konten video profil yang dimiliki JDIH DPRD Kota Surakarta.

Dalam penyebaran informasi secara lebih luas untuk perusahaan atau instansi maka perlu adanya *video company profile*. *Video company profile* saat ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyebarkan informasi suatu perusahaan atau instansi karena dapat meliputi, visi-misi, nilai, serta prestasi yang telah didapat yang dikemas dengan menarik (Baqi, Ramadhan, Akbar, & Budiarto, 2025). Selain itu *video company profile* juga sangat penting bagi instansi, karena perusahaan atau instansi dapat memaparkan sejarah, visi-misi, produk atau layanan dari institusi, hingga keunggulan kepada khalayak (Kusmayanti, 2024).

Imbuhan dari Setya Rini, yaitu salah satu anggota tim pengelola media sosial lewat wawancara personal mengatakan bahwa :

“Sebenarnya untuk video profil JDIH itu sudah ada dari tahun 2022, videonya juga dilampirkan di website JDIH, bentuknya slide-slide. Kalo memang ingin memperbarui mungkin dengan konsep yang berbeda dan lebih bagus lagi.”
(13/4)

Melalui video profil JDIH DPRD Kota Surakarta pada Youtube ini bertujuan untuk meningkatkan *Engagement* dengan audiens, lewat pendekatan yang menarik dan mudah diakses. Video profil JDIH ini dicantumkan pada laman website-nya di www.jdih.setwan.surakarta. Data disajikan dibawah ini :



Gambar 1. 3 Video profil JDIH DPRD Kota Surakarta Tahun 2022

(Diakses pada 25/04/2025 melalui Platform Youtube)

Video profil ini diunggah sejak 28 Desember 2022 dan ditampilkan dalam bentuk *slide show* (bentuk video yang menampilkan serangkaian gambar yang bergeser atau berpindah), dengan durasi 43 detik. Isi dari video profil tersebut meliputi tulisan website, gambar dokumen hukum, gambar berita hukum, gambar dasar hukum, dan ajakan untuk mengunjungi website.

Hasil yang didapat dari publikasi video profil JDIH sejak tahun 2022 yaitu, 0 komentar, dan 2 suka (*like*). Ini merupakan jumlah interaksi atau *engagement* yang diperoleh dari hasil unggahan tersebut. *Engagement* merupakan metrik sederhana untuk menghitung jumlah interaksi pada sebuah konten yang diunggah. Data disajikan sebagai berikut :



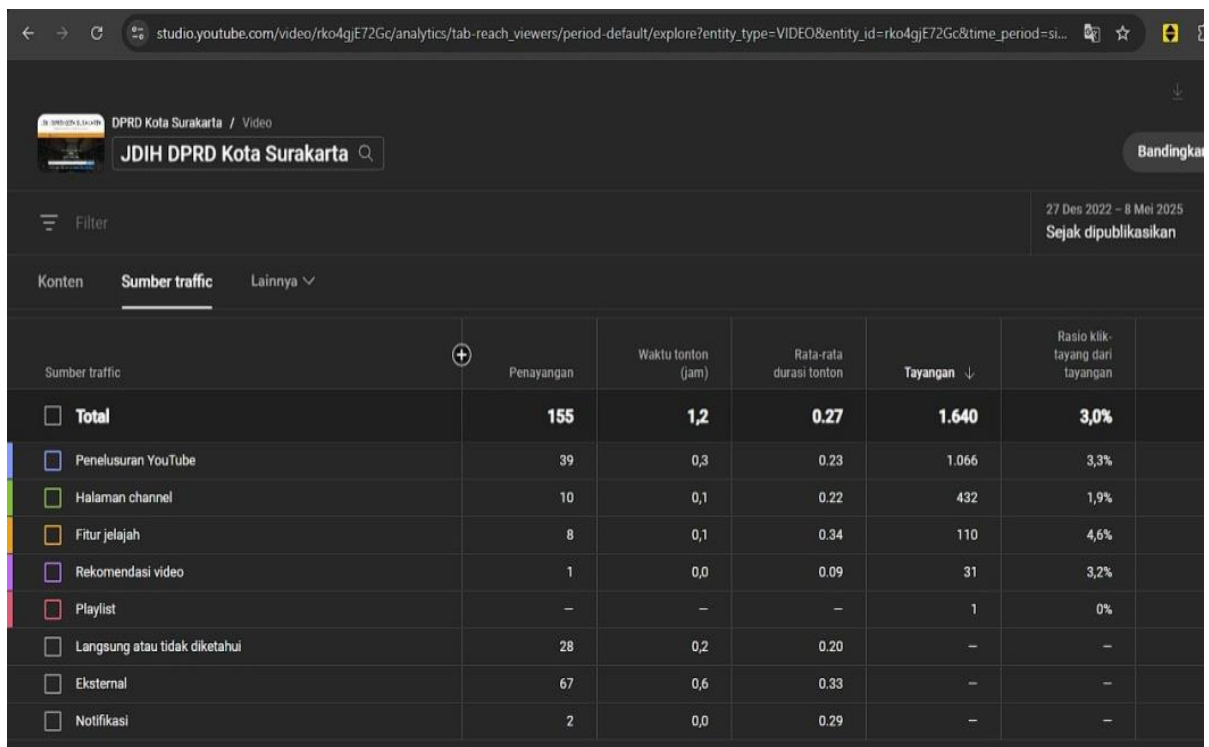
Gambar 1. 4 Jumlah Komentar dan suka (*Like*) pada Video Profil JDIH

(Diakses pada 20/07/2025 melalui PlatformYoutube)

Pada Platform Youtube, interaksi dapat terjadi apabila terdapat audiens yang berkomentar, membagikan video (*Share*), dan menyukai video (*Like*) (Ricko & Junaidi, 2019). Lalu, untuk metriks Youtube dapat dihitung dengan menggunakan interaksi audiens dari penayangan (*views*), suka (*Like*), dan komentar (Violot, Elmas, Bilogrevic, & Humbert, 2024).

Dalam fitur Youtube Analytics melalui Youtube Studio, bahwa *Engagement* (Interaksi Audiens) dapat menampilkan respon dari audiens pada video dengan metrik *Watch time* (lamanya audiens menonton video) dan *Average view* (durasi rata-rata yang dihabiskan audiens untuk menonton video) (redcomm.co.id, 2025).

Berikut adalah data analisis dari Video profil JDIH DPRD Kota Surakarta yang diunggah pada Platform Youtube, data diambil berdasarkan fitur Youtube Analytics :



Sumber traffic	Penayangan	Waktu tonton (jam)	Rata-rata durasi tonton	Tayangan ↓	Rasio klik-tayang dari tayangan
☐ Total	155	1,2	0,27	1.640	3,0%
☐ Penelusuran YouTube	39	0,3	0,23	1.066	3,3%
☐ Halaman channel	10	0,1	0,22	432	1,9%
☐ Fitur jelajah	8	0,1	0,34	110	4,6%
☐ Rekomendasi video	1	0,0	0,09	31	3,2%
☐ Playlist	–	–	–	1	0%
☐ Langsung atau tidak diketahui	28	0,2	0,20	–	–
☐ Eksternal	67	0,6	0,33	–	–
☐ Notifikasi	2	0,0	0,29	–	–

Gambar 1. 5 Analisis Metrik Youtube melalui Aplikasi Youtube Studio

(Diakses pada 09/05/2025 melalui Aplikasi Youtube Studio)

Data di atas merupakan hasil dari unggahan video profil yang terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 9 Mei 2025, dengan total 155 penayangan, dan 1,640 tayangan. Dari data yang diperoleh maka dapat dilakukan perhitungan *engagement* dengan menggunakan rumus *Engagement Rate Reach*, dimana interaksi (komentar dan *Like*) serta jumlah tayangan yang akan difokuskan untuk menentukan jumlah *engagement*.

Berikut adalah rumus untuk menghitung total *Engagement Rate Reach* pada sebuah video :

Tabel 1. 1 Rumus *Engagement Rate Reach* (EER)

$$\begin{aligned} & \text{Engagement Rate :} \\ & [(\text{Jumlah komentar} + \text{Jumlah Like}) / \text{Jumlah Penayangan}] \times 100\% \end{aligned}$$

Total *Engagement Rate Reach* pada video profil JDIH DPRD apabila dihitung menggunakan rumus di atas adalah :

Tabel 1. 2 Total *Engagement Rate Reach* Video profil JDIH DPRD Kota Surakarta

$$\begin{aligned} & \text{ERR Video profil JDIH DPRD Kota Surakarta :} \\ & [(\text{Jumlah komentar} + \text{Jumlah Like}) / \text{Jumlah Penayangan}] \times 100\% \\ & [(0 + 1) / 155] \times 100\% = 0,66\% \end{aligned}$$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan EER Video profil JDIH DPRD Kota Surakarta sebesar 0,66%. Ini merupakan hasil *engagement* yang masih tergolong rendah, dan perlu ditingkatkan.

Engagement Rate untuk Platform Youtube yang tinggi berada pada angka diatas 6%, ini menunjukkan bahwa tingkat interaksi audiens sangat baik. Lalu, pada angka 3% - 6% menunjukkan tingkat interaksi yang sedang, dan pada angka dibawah 3% berarti nilai *engagement* tersebut rendah, yang diperlukan peningkatan strategi untuk konten tersebut (Kol.id, 2025).

Berikut adalah hasil *engagement* pada konten video di *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta, serta video profil yang telah diunggah sebelumnya dalam bentuk *slide show* :

Tabel 1. 3 Jumlah *Engagement* semua konten *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta

Nama Konten	Jml <i>Like</i>	Jml Kmt	Jml Views	Jml ER	Waktu Posting	Dur
JDIH DPRD KOTA SURAKARTA	1	0	155	0,66%	28/12/22	43 dtk
JDIH Live TATV	2	0	28	7,14%	29/05/24	1.28dtk
Fasilitas JDIH	1	0	29	3,44%	29/05/24	1.16dtk
Website JDIH 2024	0	0	33	3,44%	29/05/24	1.09dtk
Bincang JDIH 28 Mei 2024	2	0	126	1,59%	03/06/24	2.11dtk

(Sumber : Akun Youtube @DPRDKotaSurakarta dan *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta)

Ket : Tabel berwarna hijau adalah video berbentuk *slide show*.

Konten dalam bentuk teks, gambar, atau gabungan dari keduanya, tidak menimbulkan ketertarikan audiens untuk berinteraksi. Sebaliknya, jika konten dikemas dalam bentuk video akan mendorong keterlibatan serta interaksi yang tinggi atau meningkatkan *engagement* di berbagai Platform media sosial (Wardhana & Widhiandono, 2024).

JDIH DPRD Kota Surakarta menghadapi kendala dalam penyebaran informasi di Platform Youtube, yaitu kurangnya pembaruan konten secara rutin dan interaksi dengan audiens, sehingga hal ini dapat mengurangi minat

dan partisipasi para audiens dalam menanggapi video profil yang telah diunggah. Lalu, kurangnya pemanfaatan fitur-fitur yang terdapat pada Youtube, dengan begitu potensi untuk meningkatkan *Engagement Rate* melalui konten-konten yang diunggah jadi terbatas. Upaya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan JDIH, serta mempelajari strategi publikasi informasi hukum, dan pemahaman perkembangan teknologi sesuai dengan regulasi yang berlaku, JDIH DPRD Kota Surakarta melakukan Studi Banding ke Setwan Kabupaten Sukoharjo, sumber (<https://vt.tiktok.com/ZShaTc9nn/>).

Berdasarkan teori dan data yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menulis tugas akhir ini dengan tujuan untuk mengimplementasikan strategi *public relations*. Penulis akan memproduksi video *company profile* yang memuat informasi identitas dari JDIH DPRD Kota Surakarta. Dengan adanya penelitian tugas akhir ini, diharapkan instansi dapat mengembangkan serta memaksimalkan potensi yang terdapat pada *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta sebagai salah satu penyebaran informasi yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengamati bahwa produksi konten video profil pada *Playlist* JDIH DPRD Kota Surakarta melalui akun Youtube DPRD Kota Surakarta dengan username @DPRDKotaSurakarta belum optimal, sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya *engagement*. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui “Bagaimana strategi *public relations* dapat di implementasikan untuk meningkatkan *Engagement Rate* pada akun Youtube DPRD Kota Surakarta?”.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembuatan karya ini yaitu untuk mengimplementasikan strategi *public relations* melalui

produksi video *company profile* yang informatif dan menarik mengenai JDIH DPRD Kota Surakarta, untuk meningkatkan *engagemet rate*.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari karya ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Karya ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam membuat video *company profile* di Platform Youtube, dan mengembangkan penyebaran informasi melalui media sosial di suatu instansi.

2. Bagi Prodi Informasi dan Humas

Tugas akhir dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan menganalisis lebih lanjut mengenai media sosial dalam penyebaran informasi hukum.

3. Bagi Instansi JDIH DPRD Kota Surakarta

Karya ini diharapkan dapat meningkatkan *engagement* dari akun Youtube DPRD Kota Surakarta, serta dapat membantu memperkenalkan instansi ke masyarakat luas.

4. Bagi Masyarakat

Karya ini diharapkan dapat memberi pemahaman pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat mengenai informasi hukum dari JDIH DPRD Kota Surakarta melalui video *company profile*.

1.5 Luaran

Luaran yang dihasilkan dalam tugas akhir ini yaitu tiga video *company profile* yang akan diunggah pada Platform Youtube dan pendaftaran penciptaan HKI. Konten tersebut berisikan informasi mengenai JDIH DPRD Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pada konten

Youtube JDIH DPRD Kota Surakarta dengan total durasi ketiga video yaitu 7 menit 47 detik.